BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6/ 180 /2025
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 adalah mewujudkan reformasi birokrasi berkualitas dan fungsional yang dijabarkan kedalam road map reformasi birokrasi dan tingkat pencapaiannya diukur dari rencana aksi reformasi birokrasi, perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Rencana Aksi Reformsi Birokrasi sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi di kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup :
a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
b. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
c. Target - target Kinerja; dan
d. Perangkat Daerah Koordinator dan Perangkat Daerah Pelaksana.

KELIMA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

KEENAM : Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menjadi Koordinator indikator melaporkan progres pelaksanaan kegiatan rencana aksi secara triwulan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh u.p Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KETUJUH : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Singkil;
b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan/atau
c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 APRIL 2025
10 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 0008.6 / 180 /2025
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
REFORMASI BIROKRASI TEMA STUNTING																
1	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Balita	Ibu Hamil - Ibu yang memiliki anak balita usia 0-59 Bulan	Jumlah Ibu hamil mengikuti Kelas Ibu Hamil dan Jumlah Ibu Balita mengikuti Kelas Ibu Balita	3480	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Pelaksanaan Kelas Ibu Balita.	Orang	Jumlah Ibu hamil mengikuti Kelas Ibu Hamil dan Jumlah Ibu Balita mengikuti Kelas Ibu Balita	870	870	870	870	3.480	Kelas Ibu Hamil	Rp 953.470.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
2	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat.	Penjab Promkes	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan bumil sehat	24	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat.	Orang	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan bumil sehat			24		24	Pelaksanaan Gerakan Bumil Sehat.	Rp 36.245.000	Dinas Kesehatan	Promkes
3	Kurangnya langkah preventif dalam mencegah stunting seperti upaya mendeteksi sejak dini faktor-faktor penyebab stunting dimasyarakat	Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan, Keluarga yang memiliki anak 0 - 23 Bulan	Pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga	12149	Pendampingan Sasaran Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan, Keluarga yang memiliki anak 0 - 23 Bulan	orang	Tersedianya Rekapitulasi laporan hasil pendampingan yang dilaporkan per tiga bulan melalui aplikasi E-Simil	500	500	1000	3180	5180	Pendampingan sasaran beresiko stunting	Rp630.000.000	Koordinator PLKB	Anggota TPK
4	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Bumil KEK dan Risiko KEK	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan PMT Lokal	290	Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK	Orang	Jumlah Ibu hamil mendapat PMT lokal		97	97	97	290	Penyediaan Makanan	Rp 1.113.600.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
5	Rendahnya SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD	Guru SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Pelaithan Guru	orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	103.001.500		103.001.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	103.001.500	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
6	Kurangnya monitoring dan evaluasi kepada sasaran beresiko stunting	Calon Pengantin, Ibu hamil, Ibu Pasca Persalinan, Keluarga yang memiliki anak 0 - 59 Bulan	Pendampingan dan pemantauan oleh kader Tim Pendamping Keluarga	12149	Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting	orang	Tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan sasaran beresiko stunting	500	500	1000	3180	5180	Pencatatan hasil pemantauan sasaran beresiko stunting	Rp525.000.000	Koordinator PLKB	kader TPK
7	pemberian edukasi gizi dalam rangka mencegah stunting belum optimal	Keluarga yang mempunyai anak baduta yang stunting, resiko stunting, ibu hamil	Operasional DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	5 x	Sosialisasi Edukasi Gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) oleh ahli gizi	Kegiatan	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan keluarga beresiko stunting dalam penyediaan makanan bergizi	1	1	1	2	5x	Sosialisasi	Rp638.000.000	DP3AP2KB dan Koordinator PLKB	Ahli Gizi dan kader PPKBD , kader Posyandu, kader RGK
8	belum memadainya sarana/alat bantu penyuluhan untuk mengatasi stunting	Kelompok BKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di desa lokus stunting dan Kampung Keluarga Berkualitas	Penyediaan sarana/alat bantu penyuluhan stunting	10	Pengadaan BKB Kit Stunting	Paket	Terdistribusinya sarana BKB Kit Stunting untuk Kelompok BKB terutama di desa lokus stunting				10	10	Pengadaan BKB Kit Stunting	Rp130.000.000	DP3AP2KB	Anggota kelompok BKB
9	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Balita usia 6-59 bulan Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Jumlah Gizi kurang mendapat PMT Lokal	2423	Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang.	Orang	Jumlah Gizi kurang mendapat PMT Lokal	606	606	606	606	2.423	Penyediaan Makanan	Rp 3.392.200.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
10	Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang	Balita	Jumlah Balita yang di pantau pertumbuhan dan perkembangannya	11.012	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	Orang		2.753	2753	2753	2753	11.012	Pemantauan Tumbuh Kembang	Rp 1.081.955.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
11	Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan.	Bayi Baru Lahir Usia 0-6 Bln dan Anak usia 6-23 bulan	Jumlah Bayi baru lahir usia 0-6 bulan dan Jumlah Anak mendapat MP-ASI (makanan pendamping ASI)	5.567	Pendampingan Pada Ibu Yang Baru melahirkan untuk dapat memberikan ASI Ekslusif dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan Pemantauan Praktik MP-ASI Anak Usia 6-23 bulan	Orang	Jumlah Bayi baru lahir usia 0-6 bulan dan Jumlah Anak mendapat MP-ASI (makanan pendamping ASI)	1.392	1.392	1.392	1.392	5.567	Pendampingan Pemberian ASI ekslusif dan Pemantauan Praktik MP-ASI Anak Usia 6-23 bulan	Rp 429.055.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
12	Pendampingan Rujukan Balita stunting/Gizi Buruk	Balita usia 0-59 bulan	Jumlah Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	20	Pendampingan Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Kasus	Jumlah Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	5	5	5	5	20	Pendampingan Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Rp 31.420.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
13	Imunisasi	bayi, balita,bumil	Jumlah bayi, balita,bumil yang diimunisasi	3311	Memberikan imunisasi kepada bayi, balita, bumil	Orang	Jumlah bayi, balita,bumil yang diimunisasi	828	828	828	828	3.311	Pelaksanaan Imunisasi	Rp 387.125.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
		REMAJA PUTRI														
14	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas).	SD, SLTP dan SLTA/Sederajat	Jumlah Anak SD yang mendapat Pelayanan UKS, Jumlah Siswa-siswi SLTP, SLTA di Screening Hb, Jumlah Rematri yang mendapat dan mengonsumsi tablet tambah darah	41886	Penjaringan Anak Sekolah, Pemeriksaan Hb Siswa Siswi SLTP-SLTA, Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri	Orang	Jumlah Anak SD yang dilakukan Penjaringan, Jamlah Siswa-siswi yang diperiksa Hb, Jumlah Rematri yang mendapat dan mengosumsi TTD	10.472	10472	10472	10472	41.886	Sekolah	Rp 1.459.090.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
15	Kurangnya pengawalan dan evaluasi pelaksanaan Tim pendamping keluarga di tingkat kecamatan	Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan, PKB/PLKB, Satgas TPPS, Danramil, kapolsek,KUA, Kepala Desa , PKK, Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Kader TPK, Pendamping Desa	Lokakarya Mini Kecamatan	10 x	Rapat Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendampingan sasaran beresiko stunting	Kegiatan	Daftar Rencana Kerja yang akan dilakukan pengendalian dan evaluasi	2	2	3	3	10x	Rapat Koordinasi	Rp220.000.000	DP3AP2KB	PKB/PLKB,TPK,
16	pemberian edukasi gizi dalam rangka mencegah stunting belum optimal	Keluarga yang mempunyai anak baduta yang stunting, resiko stunting, ibu hamil	Operasional DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	10 x	Sosialisasi Edukasi Gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) oleh ahli gizi	Kegiatan	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan keluarga beresiko stunting dalam penyediaan makanan bergizi	1	1	1	22	5x	Sosialisasi	Rp638.000.000	DP3AP2KB dan Koordinator PLKB	Ahli Gizi dan kader PPKBD , kader Posyandu, kader RGK
17	Belum Optimalnya Peran Lintas Sektor dalam percepatan penurunan Stunting	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) lintas sektor	Susunan Keanggotaan TPPS	4x	Koordinasi, Fasilitasi,evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan stunting	kegiatan	Laporan perkembangan percepatan penurunan stunting	1	1	1	1	4x	rapat koordinasi	Rp250.000.000	Ketua TPPS	Anggota TPPS
18	Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapanPMT berbahan pangan lokal Puskesmas	Kader	Tim Pelaksana PMT Lokal Terlatih	300	Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapanPMT berbahan pangan lokal Puskesmas	Orang	Jumlah kader terlatih	0	300	0	0	300	Pelatihan	Rp 176.260.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
19	Survey kualitas air minum ditingkat rumah tangga	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga survey kualitas air minum	348	Pemeriksaan air bersih dan air minum rumah tangga	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga survey kualitas air minum		348	348	348	1.044	Pemeriksaan air	Rp 92.400.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
20	Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta OJT kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak FKTP ke RS.	Dokter Umum, Bidan, Perawat	Jumlah Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KIA, gawatdarurat, dan sistem rujukan maternal	36	Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, gawat darurat, dan system rujukan maternal neonatal melalui pendampingan oleh tim ahli (spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai pendamping	Kegiatan	Jumlah Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KIA, gawatdarurat, dan sistem rujukan maternal		18	18		36	Pendampingan Tim Ahli	Rp 37.098.000	Dinas Kesehatan	Kesga Gizi
21	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	Penjab Promkes	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan aksi bergizi	24	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	Orang	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan aksi bergizi			24		24	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	Rp 39.509.800	Dinas Kesehatan	Promkes
22	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Penjab Promkes	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan cegah stunting	24	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Orang	Jumlah Penjab Promkes yang akan melakukan gerakan cegah stunting				24	24	Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting	Rp 37.845.000	Dinas Kesehatan	Promkes

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
23	Belum Optimalnya Peran Lintas Sektor dalam percepatan penurunan Stunting	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) lintas sektor	Susunan Keanggotaan TPPS	12	Koordinasi, Fasilitasi,evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan stunting	Rapat	Laporan perkembangan percepatan penurunan stunting	3	3	3	3	12	rapat koordinasi	Rp60.533.001	Ketua TPPS/ BAPPEDA	Anggota TPPS
					Pembangunan Sistem Air minum	sambungan rumah	jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum air bersih				210	210	pengembangan jaringan distribusi	Rp1.266.593.049	PUPR	PUPR
					penyususan dokumen	dokumen	terselesaikannya dokumen perencanaan				2	2	perencanaan	Rp248.399.999	PUPR	PUPR
24	1. Rendahnya SDM kader Posyandu 2.Sering pergantian Kader 3. Tingkat pendidikan yg masih beragam 4. Keterbatasan dalam pencatatan dan pelaporan administrasi 5. Kurangnya penguasaan teknolgi	Kader posyandu	Peningkatan kualitas pelayanan posyandu	25 Desa	Sosialisai peran kader posyandu	74 Kader	Meningkatnya Kapasitas dan keterampilan kader	-	-	10.000.000	15.000.000	25.000.000	Sosialisasi Pembinaan Kader Posyandu	25.000.000	DPMK	DPMK
REFORMASI BIROKRASI TEMA KEMISKINAN																
		Mahasiswa	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	Persentase Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25	25	25	25	100	Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri	850.000.000	MPD	
		Masyarakat	Persetase Sarana Perkebunan yang Disediakan	100% (34000 Batang)	Benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Persen	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	30	40	30	100	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	800.000.000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur Perkebunan	5 Unit	Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Persen	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	30	40	30	100	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.047.250.000	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Masyarakat	Persentase Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 % (80 Orang)	Memberikan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	100	0	0	0	100	Penyediaan Sandang	147.316.000	Dinsos	Dinsos
		Masyarakat	Memberikan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin untuk Meningkatkan kesejahteraan Keluarga	100 Orang	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	0	0	0	100	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	53.292.000	Dinsos	Dinsos
		Masyarakat	Persentase Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	100% (200 Orang)	Memberikan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	100	100	Penyediaan Makanan	149.999.820	Dinsos	Dinsos
		Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal KewenanganKabupaten/Kota	88 Orang	Memberikan Pemenuhan Kebutuhan makanan lansia Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	88	0	0	0	88	Penyediaan Permakanan	46.708.000	Dinsos	Dinsos

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
1	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar yang masih minim dan belum terintegrasinya pendataan penduduk miskin	Masyarakat	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis di luar panti dan PPKS selain Napza/HIV	45 Unit	Memberikan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	10	10	21	45	Penyediaan Alat Bantu	65.377.775	Dinsos	Dinsos
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	100 % (100 orang)	Memberikan ZIS Senif Fakir	Persen	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	0	50	50	0	100	Pemberian ZIS Senif Fakir	50.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	1600 orang	Memberikan ZIS Senif Miskin	orang	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	1600	0	0	0	1600	Pemberian ZIS Senif Miskin	1.210.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	30 orang	Memberikan ZIS Senif Muallaf	orang	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	0	0	0	30	30	Pemberian ZIS Senif Muallaf	230.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	70 orang	Memberikan ZIS Senif Gharimin	orang	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	0	0	0	70	70	Pemberian ZIS Senif Gharimin	70.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	200 orang	Memberikan berupa intensif ZIS Senif Fisabilillah	orang	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	200	0	0	0	200	Pemberian ZIS Senif Fisabilillah	100.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	55 orang	Memberikan ZIS Senif Ibnu Sabil	persen	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil	25	25	25	25	100	Pemberian ZIS Senif Ibnu Sabil	131.000.000	Baitulmal	Baitulmal
		Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	2179 orang	Memberikan ZIS Senif Infaq	persen	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	25	25	25	25	100	Pemberian ZIS Senif Infaq	2.791.110.000	Baitulmal	Baitulmal
		Pemberdayaan UMKM	jumlah penerima bantuan UMKM	20 UMKM	Bantuan Peralatan Usaha Mikro	jumlah	jumlah penerima bantuan UMKM	-	20	0	0	20	Bantuan Peralatan Usaha	245.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM	Bidang UMKM
		Masyarakat	Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan Ditingkat Pertama Pada masyarakat	3 Paket	Sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan	persen	Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan	25	25	25	25	100	Pengadaan Obat	5.519.851.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
		Masyarakat	Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan Ditingkat Pertama Pada masyarakat	150 Orang	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persen	Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan	0	30	50	20	100	Pelayanan Kesehatan	195.850.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
		Siswa	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	360 Siswa	Pengadaan Perlengkapan siswa Sekolah dasar	Persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	100	0	100	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Siswa	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	428 Siswa	Pengadaan Perlengkapan siswa Sekolah/Menengah Pertama	Persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	100	0	100	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	197.870.820	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Siswa	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	214 Siswa	Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	Persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	100	0	100	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	99.054.180	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Sekolah	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	1 Tahun	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	50	0	50	0	100	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.820.800.000	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Sekolah	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	1 Tahun	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persen	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	50	0	50	0	100	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.837.614.000	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Sekolah	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	1 Tahun	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persen	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	50	0	50	0	100	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.379.265.000	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Sekolah Non formal/ Kesetaraan	Persentase peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai	1 Tahun	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	50	0	50	0	100	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	258.410.000	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan	Dinas Pendidikan dan Kerbudayaan
		Jalan Desa Kabupaten	Tersedainya sarana jalan kabupaten	7 KM	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	Persen	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	0	30	45	25	100	Pembangunan Jalan	32.134.929.671	PUPR	PUPR
		Jalan Desa Kabupaten	Tersedainya sarana jalan kabupaten	5 KM	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	Persen	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0	30	45	25	100	Pembangunan Jalan	1.752.980.000	PUPR	PUPR
		Pemeliharaan Jalan Desa Kabupaten	Tersedainya sarana jalan kabupaten	4 KM	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	Persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	30	45	25	100	Pemeliharaan Jalan	480.070.000	PUPR	PUPR
		Pembangunan Jembatan	Tersedainya sarana jalan kabupaten	5 Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	Persen	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0	30	45	25	100	Pembangunan Jembatan	4.154.758.000	PUPR	PUPR
		Pemeliharaan rutin jalan	Tersedainya sarana jalan kabupaten	240 KM	Panjang jalan kabupaten yang terbangun, terpelihara dan terkoneksi	Persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0	30	45	25	100	Pemiliharaan rutin jalan	230.000.000	PUPR	PUPR
		Pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin	Persentase Penguruangan Permukiman Kumuh	5 Unit	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persen	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	30	45	25	100	Pembangunan rumah tidak layak huni	475.000.000	PUPR	PUPR
		Perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin	Persentase Penguruangan Permukiman Kumuh	30 Unit	Pengurangan Permukiman Kumuh	Persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0	30	45	25	100	Rehab rumah tidak layak huni	571.500.000	PUPR	PUPR
		Meningkatnya pendapatan nelayan kecil	Nilai Tukar Nelayan	200 orang	Memberikan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan kecil	Orang	Jumlah nelayan kecil yang mendapat bantuan	0	50	100	50	200	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Rp2.403.153.644	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
2	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat SMP	428	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	384.720.820	-	384.720.820	Pengadaan seragam Sekolah SMP (Dau-SG)	384.720.820	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
3	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat SD	360	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	198.000.000	-	198.000.000	Pengadaan seragam Sekolah SD (Dau-SG)	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
4	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat PAUD	214	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	99.054.180	-	99.054.180	Pengadaan seragam Sekolah SMP (Dau-SG)	99.054.180	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
5	Rendahnya SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD	Guru SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Pelaithan Guru	orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	-	-	103.001.500		103.001.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	103.001.500	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
6	1.Keterbatasan sumber penghasilan Ibu Rumah Tangga 2.Belum maksimalnya potensi ekonomi Rumah Tangga 3.Kurangnya pengetahuan tentang standar produk	Ibu Rumah Tangga	1. Pengikatan pendapatan keluarga 2. Membuka peluang usaha bar	25	Pelatihan Pembuatan Kue Kering Tradisional untuk Ibu Rumah Tangga	orang	Meningkatnya keterampilan kreativitas dalam mengolah bahan dan membuat variasi kue	-	-	15.000.000	-	15.000.000	Pelatihan Pembuatan Kue Kering Tradisional	15.000.000	DPMK	DPMK
7	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat SMP	428	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	384.720.820	-	384.720.820	Pengadaan seragam Sekolah SMP (Dau-SG)	384.720.820	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
8	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat SD	360	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	198.000.000	-	198.000.000	Pengadaan seragam Sekolah SD (Dau-SG)	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
9	Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid, cakupan pelayanan dasar bagi siswa miskin	Siswa Tidak Mampu	Tersedianya pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin tingkat PAUD	214	Bantuan Langsung Seragam Sekolah	pasang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	99.054.180	-	99.054.180	Pengadaan seragam Sekolah SMP (Dau-SG)	99.054.180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
REFORMASI BIROKRASI TEMA P3DN																
1	Masih banyak pelaku usaha lokal belum mendaftar ke e-katalog	Peningkatan Produk dalam Negeri	Jumlah sosialisasi	3	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kegiatan	Jumlah sosialisasi PDN	0	0	0	3 kali	3 kali	Terkait	0	Dinas Perindagkop dan UKM	Bidang Perdagangan
REFORMASI BIROKRASI TEMA INFLASI																
1	Keterjangkauan Harga (Kenaikan Harga Barang dan Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi covid)	Pengendalian Harga Bahan Pokok/Pangan Pokok	Harga Bahan Pokok/ Pangan Pokok	HET	Pasar Murah, Pengembangan UMKM, Peningkatan Potensi Daerah dan Membuka Lapangan Kerja untuk daya beli lebih meningkat	Harga	Terkendalinya harga sesuai Harga Eceran Tertinggi	HET	HET	HET	HET		Pelaksanaan pasar murah keliling	Rp500.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM/ Dinas Pangan	Bidang Perdagangan/ Bidang Distribusi dan Cadangan
2	Ketersedian Pasokan Bahan Pokok/Pangan Pokok Kabupaten Aceh Singkil	Bahan Pokok/Pangan Pokok	tingkat ketersedian bahan pokok	29 KK	Gerakan Menanan Aceh Singkil (GERMAS)	KK	Ketersedian		29 KK			29 KK	1. SUKMA (Suka Menanam) B2SA 2	Rp295.288.860	Asisten Perekonomian & Pembangunan	Dinas Pangan
		Kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan	Peningkatan Populasi Peternakan	13 Ekor	Pengadaan Bibit Ternak Ruminansia	Ekor	Meningkatnya jumlah populasi ternak ruminansia (ternak besar).			13		13	Pemberian bantuan bibit ternak Kerbau dan Sapi kepada kelompok tani	Rp182.600.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
		Masyarakat yang membutuhkan layanan medis veteriner	Persentase Penangana Angka Kesakitan Hewan	3 Puskeswan	Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Puskeswan	Cakupan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			13		13	Pemberian pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada Masyarakat	Rp25.684.204	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
		Unit Penyedia Jasa Alsinta (UPJA)	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5 Unit	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang diadakan		5			5	Peningkatan kualitas dan kuantitas Alat dan Mesin Pertanian yang dikelolah oleh UPJA	Rp500.000.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
	Bukan daerah Produksi sehingga kebutuhan bahan pokok didatangkan dari Kabupaten tetangga/ daerah penghasil)	Kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	3 Unit	Pembangunan Rumah Bibit		Jumlah Rumah Bibit yang dibangun			3		3	Pemberian bantuan Rumah Bibit kepada Kelompok Tani	Rp150.000.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
		Kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6 Jenis	Pengadaan Bibit Sayuran	Jenis	Tersedianya sarana produksi Hortikultura		6			6	Pemberian bantuan Bibit Sayuran kepada Kelompok Tani	25.085.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
		Kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan khususnya komoditi Padi	Tingkat Produktivitas Pertanian (padi)	500 Set	Pengadaan Jaring Burung	Set	Tersedianya sarana produksi Tanaman Pangan (Padi)		500			500	Pemberian bantuan sarana produksi komoditi Padi berupa Jaring Burung kepada Kelompok Tani	105.000.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
		Kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan khususnya komoditi Padi	Tingkat Produktivitas komoditi Jagung	12 Ha.	Pengadaan Benih dan Pupuk	Ha.	Tersedianya sarana produksi Tanaman Pangan (Jagung)		12			12	Pemberian bantuan sarana produksi komoditi Jagung kepada Kelompok Tani berupa Benih dan Pupuk	51.540.000	Bappeda/ Bagian Ekonomi Setdakab	DTPHP
2	Kelancaran Distribusi (Kabupaten Aceh Singkil Bukan daerah Produksi, letak geografisnya diujung barat selatan provinsi Aceh dan bukan daerah lintasan nasional)	Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Dermaga	2 unit	Sarana dan Prasarana Transportasi	Persen	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Tambat	30%	30%	20%	20%	100%	Pembangunan Dermaga Tambat	Rp400.000.000	Asisten Perekonomian & Pembangunan	Dinas Perhubungan
3	Komunikasi Efektif (Faktor Cuaca dan Letak Geografis Aceh Singkil yang terletak diantara Dua muara sungai yaitu Lea Cinendang dan Lae Soraya. Yang sewaktu-waktu bisa meluap	Informasi	Frekuensi		Kerjasama Antar Daerah Koordinasi Lintas TPID	Informasi	Frekuensi	70	70	70	70	70	1. Kordinasi TPID dan Sosialisasi 2. Kerjasama Antar Daerah	Rp138.673.250	Asisten Perekonomian & Pembangunan	Bagian Perekonomian Dinas Pangan
4	daya beli masyarakat turun	peningkatan daya beli masyarakat melalui keterbukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat daya beli	20 orang	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	orang	tingkat daya beli masyarakat		20			20	Pengadaan sarana usaha mikro untuk Pelaku usaha kecil	Rp245.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM/ Dinas Pangan	Bidang Perdagangan/ Bidang Distribusi dan Cadangan
5	Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Singkil	Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Aceh Singkil	Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	2,6 Triliyun	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	5	10	5	5	25	Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	DPMPTSP
					Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Perencanaan	-	-	-	-	-	Penyusunan peta potensi investasi	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	DPMPTSP

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output	Target					Jenis Kegiatan Aksi	Jumlah Anggaran	Unit /Satuan Kerja Pelaksana	
							Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
				91 Persen	Pelayanan Penanaman Modal	Persen	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	25	25	25	16	91	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha, dan Pemantauan, evaluasi perizinan berusaha	53.603.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	DPMPTSP

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 0008.6 / 140/2025
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)		Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	11
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif															
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	85%	1	Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh singkil	Perbup	Jumlah regulasi kelembagaan perangkat di kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan	-	-	-	14	14	Rp30.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				2	Fasilitasi penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil	SKPK	Jumlah perangkat SKPK	-	-	14	13	27	Rp15.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				3	Pengumpulan Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	SKPK	Jumlah SKPK yang mengusulkan laporan	-	20	26	-	46	Rp15.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	75%		Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Perbup	Jumlah regulasi yang ditetapkan	-	-	-	1	1	Rp8.786.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	indeks SPBE	2,2	1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengelolahan, Analisis data pendukung pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2024	indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80%	20%	100%	Rp37.380.000	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Naik	2	Penyusunan dokumen arsitektur SPBE Kabupaten	Dokumen	Dokumen Arsitektur SPBE	-	-	80%	20%	100%		Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
		Nilai SAKIP	65,00	1	Fasilitasi dan Penyusunan Pohon Kinerja SKPK	SKPK	Jumlah SKPK yang memiliki Pohon Kinerja	46	-	-	-	46	Rp5.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				2	Fasilitasi dan Penyusunan cascading kinerja SKPK	SKPK	Jumlah SKPK yang memiliki cascading Kinerja Eseslon II sampai dengan individu	46	-	-	-	46	Rp5.000.000	Bagian Organisasi Setdakab-Inspektorat - Bappeda	SKPK tekait
				3	Penyusunan rencana Aksi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah rencana aksi Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	-	1	-	-	1	Rp11.541.200	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				4	Fasilitasi penyusunan LKJ SKPK dan Sekretariat Daerah	SKPK/Bagian	Jumlah SKPK dan Bagian yang difasilitasi Penyusunan LKJ	54	-	-	-	54	Rp5.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK dan Bgian di Setdakab

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	11
				5	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah dokumen laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	-	-	-	1	Rp10.034.700	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				6	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten	1	-	-	-	1	Rp5.000.000	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				7	Penyusunan Rancangan SK Bupati Aceh Singkil Tentang Indikator Utama	Surat keputusan	Jumlah SK Bupati Aceh Singkil Tentang Indikator Utama	1	-	-	-	1	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				8	Pengukuran Rencana Aksi Sistem AKIP	Dokumen	Jumlah Dokumen pengukuran rencana Aksi sistem AKIP	46	-	-	-	46	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				9	Pembinaan Sistem AKIP SKPK	SKPK	Jumlah SKPK yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	46	-	-	-	46	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
4.		Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang Sistematis dan tepat waktu		WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah						2.472.652.200	BPKK Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
		Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	1.	Penetapan dan Pengesahan APBK tepat waktu	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan/Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD, serta terpenuhinya koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah	5		4		9	1.217.156.400	Bidang Anggaran BPKK Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
		Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	1.	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Penerimaan dan Pengeluaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	1				1	611.952.450	Bidang Perbendaharaan BPKK Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			2.	Penyelenggaraan Pembukuan dan Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (berupa kas atau setara kas)	Dokumen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Daerah	46	46	46	46	184			

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
		Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	1. Menyusun Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan dan terpenuhinya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1				1	643.543.350	Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				2. Reviu LK dan LKPJ SKPK dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah Dokumen/ Laporan Rekonsiliasi terhadap Pertanggungjawaban Belanja/ Realisasi Belanja SKPK	46	46	46	46	184			
				3. Penyerahan Laporan Keuangan tepat waktu	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil				1	1			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tingkat Pemahaman SKPK dalam menggunakan Aplikasi Barang Milik Daerah	80%	Meningkatkan tata kelola dan kualitas Laporan Inventarisasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	80%							480.954.825	BPKK Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				1. Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Kabupaten Aceh Singkil	1				1		Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Seluruh Unit Kerja
				2. Koordinasi penilaian dan penaksiran nilai aset pemerintah daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan, Penilaian Barang Milik Daerah			1		1			
				3. Pembangunan dan pengintegrasian data aset Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penatausahaan dan Penggunakan Barang Milik Daerah	46	46	46	46	184			
				4. Pendataan dan pengelolaan data aset (Barang Milik Daerah/ Inventarisasi) Barang Milik Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	46	46	46	46	184			
				5. Penghapusan dan pelelangan aset pemerintah daerah	Laporan	Jumlah Laporan Pemindahtanganan, Pemusnahanan dan Penghapuasan Barang Milik Daerah			1		1			
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	70%	1 Melakukan Monitoring Evaluasi atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal pada SKPD	Laporan	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Apip	1	1	1	1	4	117.294.000	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	11
				2	Sosialisasi penyelesaian TLHP APIP pada Kampong (2 Kali)	Dokumen	Persentase Sosialisasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Apip	1	1	1	1	4	-	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				3	Sosialisasi penyelesaian TLHP APIP pada OPD	Dokumen	Persentase Sosialisasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Apip		1	1		2	-	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				4	Tindak lanjut Temuan BPK RI dan APIP	Laporan	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Apip	1	1	1	1	4	-	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	25,29	1	Penginputan dan *Publishing* daftar arsip statis ke dalam aplikasi SIKN-JIKN	berkas	Jumlah berkas penginputan dan mempublish daftar arsip statis ke dalam aplikasi	-	-	1	-	1	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	UNIT KEARSIPAN
				2	Pendampingan Implementasi Aplikasi Srikandi di SKPK	SKPK	Jumlah SKPK Implementasi Aplikasi Srikandi di SKPK	-	46	-	-	46	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
				3	Sosialisasi Aplikasi Srikandi	SKPK	Jumlah SKPK yang tersosialisasi Sosialiasi Aplikasi Srikandi	-	46	-	-	46	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
				4	Fasilitasi Penginputan Admin Srikandi Kabupaten	Unit	Jumlah Akun Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	2	-	-	2	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
				5	Fasilitasi Penginputan User Srikandi di SKPK	unit	Jumlah Akun User Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	-	-	58	58	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
				6	Fasilitasi Penginputan tatausaha Srikandi di SKPK	unit	Jumlah Akun Tatausaha Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	-	-	46	46	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
				7	Fasilitasi Penginputan satker Srikandi di SKPK	unit	Jumlah Akun Satker Admin SKPK Aplikasi Srikandi	-	-	-	46	46	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SKPK
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP			Pembentukan Unit Pelayanan MPP	unit	jumlah mall pelayanan publik	-	-	-	1	1	,-	DPMPTSP	SKPK
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	1	Penyusunan Rencana Aksi	Dokumen	Dokumen rencana aksi pemanfaatan aplikasi SP4N-Lapor	-	100%	-	-	100&	Rp0	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				2	Melaksanakan tindak lanjut Laporan pengaduan masyarakat yang masuk serta meneruskannya kepada SKPK terkait dalam penanganan aduan	laporan	Jumlah Laporan pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	11
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan	70	1	Pembentukan Tim penilaian mandiri indeks kualitas kebijakan	Kepbup	Jumlah tim penilaian mandiri indeks kualitas kebijakan	9				9	8.250.000,-	Bag Hukum	Seluruh Unit Kerja
				2	Pelaksanaan penilaian indeks kualitas kebijakan	Laporan	Jumlah laporan penilaian indeks kualitas kebijakan				1	1	-	Bag Hukum	Seluruh Unit Kerja
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan	Indeks Reformasi Hukum	70	1	Pembentukan Tim penilaian mandiri indeks reformasi hukum	Kepbup	Jumlah tim penilaian mandiri IRH	11				11	9.750.000,-	Bag Hukum	Seluruh unit kerja
				2	Penilaian Mandiri Penerapan IRH	Laporan	Jumlah laporan penilaian mandiri IRH				1	1	-	Bag Hukum	Seluruh unit kerja
				3	Pembinaan pembentukan peraturan perundang undangan	Dokumen	Jumlah Qanun dan Perbup yang ditetapkan	10	10	20	15	55		Bag Hukum	Seluruh unit kerja
				4	Pembinaan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum lingkup Pemerintah Aceh	Dokumen	Jumlah Kepbup yang ditetapkan	100	110	200	116	526		Bag Hukum	Seluruh unit kerja
				5	Pembinaan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum lingkup Pemerintah Kab/kota	Dokumen	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi	10	10	10	15	45		Bag Hukum	Seluruh unit kerja
				6	Bantuan hukum kepada ASN	Kasus	Jumlah kasus yang diselesaikan	-	-	-	-	0	-	Bag Hukum dan BKA	Seluruh unit kerja
				7	Bantuan hukum kepada masyarakat	Kasus	Jumlah kasus yang dibayarkan	-	-	-	-	0	-	Bag Hukum	LBH
10	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengelolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Laporan	Dokumen metadata pada setiap kegiatan statistiksektoral	-	30%	30%	20%	80%	Rp10.144.500	Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
				2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	OPD	jumlah OPD yang di bina dalam kegiatan Statistik Sektoral	-	10	10	10	30		Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Seluruh Unit Kerja
11	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	48,04	1	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	100%	Rp54.998.000	Bagian PBJ Setdakab	Seluruh Unit Kerja
				2	Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang / Jasa melalui Tender, Pengadaan Langsung, E-Purchasing, Swakelola atau Penunjukan Langsung										
				3	Mengelola Sistem E-Procurement	Kegiatan	Terpenuhinya dan Terpeliharanya Sarana SPSE	25%	25%	25%	25%	100%	Rp119.400.000	Bagian PBJ Setdakab	Seluruh Unit Kerja
				4	Menyediakan Pelatihan Kepada PPK atau Panitia dan Penyedia Barang/Jasa										
				5	Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa										
				6	Meningkatakan Kapasitas Pelaku Pengadaan, PA, PPK, PPHP, Pelaku Usaha	Kegiatan	Terlaksananya Pelatihan dan Advokasi PBJ	25%	25%	25%	25%	100%	Rp54.998.000	Bagian PBJ Setdakab	Seluruh Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi		Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5		6	7	8					9	10	11
				7	Peningkatan Kompetensi Pengelola PBJ										
				8	Fasilitasi Advokasi dan Managemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa										
13	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1 Unit	1	Pencanangan Deklarasi Komitmen Pembangunan Zona Integritas	Dokumen	Penataan ZI Menuju WBK	-	1	-	-	1	Rp14.484.040,00	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
				2	Penyusunan SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Provinsi Aceh	Dokumen	Terbentuknya TIM Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Tahun 2023	-	1	-	-	1	-	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Tim Pendamping Zona Intergritas
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP			sosialisasi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah	Dokumen	Terbentuknya Tim Maturitas SPIP Kabupaten Aceh Singkil	-	1	1	1	3	Rp42.574.000,00	Inspektorat	Inspektorat
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)				Dokumen	Nilai SPI Kabupaten Aceh Singkil	-	1	1	-	2	Rp4.950.000,00	Inspektorat	PIC SPI Kabupaten Aceh Singkil
SASARA															
1	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	225	Melaksanakan Talent Pool, Membuat penjabaran terhadap Perbup Standar Kompetensi Jabatan JPT, Administrator dan Pengawas, Kerjasama dengan BKN tentang Permohonan Fasilitasi Ujian Potensi dan Kompetemsi bagi Pejabat Administrator Lingkup Pemkab Aceh Singkil		Administrator = 167. Pengawas dan JFT = 466,	Penempatan Pejabat sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja	1	1	1	1	4	Rp49.759.300,00	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
a.	Penguatan Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN	65	Nilai Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)		1	Berita Acara Penilaian	1	1	1	1	4	Rp92.066.500	BKPSDM	Seluruh Unit Keria
b.	Implementasi NSPK Manajemen	Indeks NSPK	80	Nilai NSPK		1	Berita Acara Penilaian			1	1	2	Rp92.066.500	BKPSDM	Seluruh Unit Keria
c.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	70%	Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Guru,		100	SK Jabatan Fungsional			1	1	2	Rp187.400.000	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
d.	Penguatan Manajemen Talentas ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	100%	Pelaksanaan Talent Pool		371	Penempatan Pejabat Administrator dan Pengawas sesuai dengan kompetensi			1	1	2	Rp75.000.000	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan	100%	Laporan Capaian Kinerja ASN		4586	Jumlah regulasi yang ditetapkan	1	1		1	3	Rp111.169.300	BKPSDM	Seluruh Unit Keria
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65,00	sosialisas dan Laporan hasil survey indeks Berahkhlak dan employer engagement		SKPK	Jumlah SKPA yang melaporkan hasil survey indeks Berahkhlak dan employer engagement	-	-	46	-	-	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan n (2024)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian 2025					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
		Employer Branding		sosialisasi	SKPK	jumlah SKPK yang mengikuti Sosialisasi	-	,-	1	,-	1	Rp0	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,01	1 Fasilitasi pengisian F01 PEKPPP	SKPK	Jumlah unit kerja yang difasilitasi	-	3	-	-	3	Rp12.117.520	Bagian Organisasi Setdakab	RSUD-Dinsos-Kecamatan SIngkohor
				2 Pembinaan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	SKPK	Jumlah unit lokus evaluasi PEKPPP Kab/Kota	-	3	-	-	3	Rp12.117.520	Bagian Organisasi Setdakab	RSUD-Dinsos-Kecamatan SIngkohor
				3 Penilaian Unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	SKPK	Unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	3	-	-	3	Rp12.117.520	Bagian Organisasi Setdakab	Tim Evaluator Kabupaten Aceh Singkil
				4 Pendampingan dan validasi hasil PEKPPP	Laporan	Jumlah laporan hasil verifikasi penilaian unit pelayanan publik	-	3	-	-	3	Rp12.117.520	Bagian Organisasi Setdakab	Bagian Organisasi Setdakab
				5 Fasilitasi penyusunan dan evaluasi standar pelayanan SKPK/Cabdin/UPTD	SKPK	Jumlah unit kerja yang difasilitasi	-	-	10	12	22	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				6 Penyusunan standar pelayanan	SKPK	Jumlah unit kerja yang memiliki standar pelayanan	-	-	10	12	22	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK
				8 Pendampingan dan fasilitasi penilaian kepatuhan dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan dan undang-undang pelayanan publik	SKPK	Jumlah unit kerja yang dilakukan pendampingan	-	7	-	-	7	Rp12.117.520	Bagian Organisasi Setdakab	Dinsos-Dinkes-Disdikbud-Disdukcapil-DPMPTSP-Pkm Simpang kanan Pkm Singkil Utara
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pemkab Aceh Singkil	Laporan	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	-	-	1	-	1	-	Bagian Organisasi Setdakab	SKPK

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON